

Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer

<https://rapik.pubmedia.id/index.php/rapik>

Realisasi Kinerja Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat

Azwar Subandi¹, Muhammad Risman², Rifaid^{3*}

¹Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram

²Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Mataram

³Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: ¹azwarsubandi63@gmail.com, ²muh.risman@gmail.com, ³rifaid@ummat.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 02/10/2022

Received in revised form 02/10/2022

Accepted 07/10/2022

Abstract

The concept of public services is an integral part in understanding the performance of the government in providing services to the community, so that if the performance of the services provided by the government is good and good, of course public trust in the government will be high. This study aims to analyze the realization of the performance of the Investment and Integrated Services Agency. One Stop (DPM-PTSP) NTB Province in providing public services for licensing and non-licensing for foreign investors and domestic investors. The method used is a qualitative descriptive approach, using interview instruments, documentation and observation. The results showed that the performance of public services at the Office of Investment and One Stop Service (DPM-PTSP) of Nusa Tenggara Province was good and the score was quite high based on the results of a survey of community satisfaction with services at DPM-PTSP NTB with a score of 84.71%. . Thus, it shows that the service performance provided by DPM-PTSP to its customers is quite good

Keywords: Public Service, performance, DPM-PTSP

Abstrak

Konsep Pelayanan publik, merupakan bagian integral dalam memahami kinerja dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga jika kinerja pelayanan yang diberikan pemerintah baik dan bagus, tentu kepercayaan publik terhadap pemerintah akan tinggi, penelitian ini bertujuan menganalisis realisasi kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB dalam memberikan pelayanan publik pengurusan izin dan non izin bagi investor asing maupun investor dalam nenegri. Metode yang digunakan dengan pendekatan deksriptif kualitatif, menggunakan instrumen wawancara, dokumnetasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu pintu (DPM-PTSP) Provinsi Nusa Tenggara sudah bagus dan nilainya cukup tinggi

berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang berada di DPM-PTSP NTB dengan skor 84,71%. Dengan demikian menunjukkan kinerja pelayanan yang diberikan DPM-PTSP terhadap pelanggannya cukup baik

Kata kunci: Pelayanan Publik, Kinerja, DPM-PTSP

**)Penulis Korespondensi
E-mail : rifaid@ummat.ac.id*

PENDAHULUAN

Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan sekaligus peluang, Pemerintah Daerah sudah seharusnya menyadari bahwa ada hal yang harus dibenahi dalam proses administrasi publik, yaitu terkait dengan pemberian pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan publik secara cepat, efisien, dan bisa memenuhi harapan masyarakat (Enggarani, 2016).

Pelayanan merupakan wujud dari fungsi pemerintah sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat (Halik, 2014). Pemerintah Daerah sebagai organisasi sektor publik dituntut memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan senantiasa tanggap dengan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas (Putra, 2014).

Kinerja digambarkan sebagai pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, maupun kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh karena itu kinerja organisasi layanan publik yang berkualitas akan mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan program Pemerintah (Budiman & Akhmaddhian, 2015).

Menurut Wahyuni (2012), pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa suatu program layanan dilakukan secara efisien dan efektif.

Karena ukuran keberhasilan reformasi birokrasi adalah terciptanya tatanan dalam kehidupan masyarakat menjadi serba teratur sehingga tercipta keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial (Budiman & Akhmaddhian, 2015). Terutama yang berhubungan dengan pelayanan perizinan yang selama ini dicitrakan sebagai pelayanan yang berbelit-belit, sulit diakses, memiliki prosedur yang sangat rumit, tidak adanya kepastian waktu, serta kurangnya keterbukaan biaya pelayanan yang dibutuhkan. Lebih-lebih jika ditopang oleh birokrasi yang rapuh, tidak profesional, dan lebih mengutamakan kepentingan segelintir elite, pengusaha, dan kroni (Halik, 2014).

Demikian Suparman (2017) menyebutkan, dalam pemberian pelayanan perizinan kepada masyarakat masih ditemui praktek rente yang tentunya tidak diatur dalam Peraturan Daerah. Selain itu masih terdapat kesenjangan pelayanan yang cukup lebar, akses informasi yang disediakan melalui website Dinas terkait juga menjadi kendala karena tidak semua informasi dapat diakses pada web tersebut, kurangnya media informasi mengenai perizinan, hal tersebut tidak linear

dengan slogan *good governance* tentang kemudahan, kecepatan, ketepatan, serta efektif dan efisien dalam pelayanan.

Selain itu menurut Hermawan (2018) juga ditemui masalah kelembagaan, dimana struktur organisasi yang belum efektif, tata laksana yang belum maksimal, sarana, dan prasarana kurang memadai, dan masih terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia di DPMPTSP. Sebab faktor-faktor seperti kepastian hukum, stabilitas, serta ketersediaan infrastruktur pendukung, akan sangat menentukan akselerasi pertumbuhan investasi (Tambunan, 2007).

Demikian Akhmaddhian (2012) menyatakan bahwa penanaman Modal yang baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri mengharapkan proses perizinan yang cepat dan murah, karena kehadiran investasi tidak saja penting dari segi perolehan devisa atau untuk melengkapi keterbatasan biaya pembangunan, tetapi efek lain yang ditimbulkan oleh kegiatan investasi pada pembangunan ekonomi, antara lain penyediaan lapangan kerja, pengembangan industri substitusi impor, mendorong berkembangnya industri non-migas, pembangunan daerah-daerah tertinggal, alih teknologi, dan peningkatan sumber daya manusia. Berdasarkan pertimbangan tersebut menuntut adanya kemudahan bagi investor untuk menarik minat mereka menanamkan modal (Ginting, 2008).

Dengan demikian pelayanan publik yang baik harus mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yaitu *dengan prinsip kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, kemudahan, dan keterjangkauan*.

Untuk itu konsep pelayanan terpadu satu pintu yang dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah membentuk unit kerja mampu harus memberikan kemudahan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan dengan prinsip mudah, murah, cepat, transparan melalui satu pintu (*one stop service*) (Rizal, 2018).

Karena berangkat dari kenyataan bahwa dalam upaya untuk mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan dengan kekuatan sendiri. Beberapa kendala seperti rendahnya tingkat tabungan (*saving*) masyarakat, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien, keterampilan (*skill*), kemampuan manajemen dan teknologi yang belum memadai sering menciptakan gap antara kebutuhan pembangunan dan sumber daya yang tersedia sehingga mendorong munculnya kebijakan untuk memanfaatkan bantuan-bantuan dalam bentuk kegiatan investasi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, tehnik pengumpulan data yang digunakan digunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, studi dokumentasi dilakukan dengan menganalisa website resmi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berkaitan dengan layanan investasi atau penanamna modal dan

perizinan berbasis online, juga dari dokumen-dokumen resmi DPM-PTSP tentang layanan publik realisasi kinerja aparatur dalam meningkatkan nilai investasi baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Wawancara dilakukan kepada petugas layanan yang terlibat secara langsung dalam mengurus pelayanan publik izin dan investasi kepada masyarakat.

HASIL DAN ANALISIS

Realisasi Kinerja Pelayanan Publik DPM-PTSP Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pelayanan publik merupakan sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kapasitas atau kinerja pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan, baik dari pendekatan ekonomi, menyediakan kebutuhan pokok (dasar) maupun seluruh aktifitas pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik bagi seluruh masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan terus berkembang seiring dengan tingkat perkembangan sosio-ekonomi masyarakat, artinya pada tingkat perkembangan tertentu, suatu jenis dan barang yang sebelumnya dianggap sebagai barang mewah, dan terbatas kepemilikannya atau tidak menjadi kebutuhan pokok, dapat berubah menjadi barang pokok yang diperlukan bagi sebagian besar masyarakat. Dengan demikian perubahan dan perkembangan konsep kebutuhan pokok masyarakat, terkait erat dengan tingkat perkembangan sosio-ekonomi masyarakat yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, serta perubahan politik.

Dalam konteks pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat, penulis mencoba menganalisis tentang kinerja aparat DPM-PTSP NTB dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan layanan dan bagaimana hasil yang maksimal terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat yang mengurus izin dan melakukan investasi sehingga pelayanan yang didapat oleh masyarakat lebih mudah, transparan, efisien, cepat dan tepat. Dengan melaksanakan pelayanan publik yang baik, dan kemudahan yang ditawarkan maka para pemilik modal atau masyarakat yang ingin melakukan investasi akan membawa uang mereka di Nusa Tenggara Barat, hal tersebut akan memberikan keuntungan kepada Pemerintah Provinsi dampaknya tentu pembukaan lapangan kerja baru dan pendapatan daerah bertambah. Berikut realisasi jumlah masyarakat yang mengurus izin/ Non izin yang tercatat/ diterbitkan sektor ekonomi, sosial dan kemasyarakatan selama tahun 2020.

Tabel. 1 Jumlah Izin/ Non Izin berdasarkan Sektor Usaha Yang Tercatat dan Diterbitkan

| No | Jenis perizinan | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Jumlah |
|--------------------------|-----------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------|
| Jenis Izin Sektor | | | | | | |
| 1 | Koperasi UMKM | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 2 | Kelautan dan perikanan | 163 | 156 | 160 | 157 | 636 |
| 3 | Kesehatan | 10 | 4 | 10 | 5 | 29 |
| 4 | Pariwisata | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Perdagangan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Perindustrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pertanian dan perkebunan | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Peternakan | 540 | 488 | 754 | 903 | 2685 |
| 9 | Sosial | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Tenaga kerja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 717 | 649 | 933 | 1069 | 3368 |
| Jenis Non Izin Sektor | | | | | | |
| 1 | Kelautan dan perikanan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pariwisata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Perdagangan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Pertanian dan perkebunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sosial | 8 | 3 | 4 | 4 | 19 |
| 7 | Tenaga kerja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 726 | 653 | 937 | 1073 | 3389 |

Sumber : Dinas Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Satu Pintu NTB, 2020

Berdasarkan data tabel 1 di atas menunjukkan, bahwa selama tahun 2020 jumlah izin/ non izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Nusa Tenggara Barat dari triwulan pertama sampai triwulan empat, jenis perizinan disektor peternakan yang paling banyak tercatat dan diterbitkan yaitu sebanyak 2685, dan disusul jenis perizinan disektor kelautan dan perikanan sebanyak 636, disektor kesehatan ada 29 dan disektor koperasi dan UMKM sebanyak 11, disektor pertanian dan perkebunan sebanyak 3, di sektor perdagangan ada 2, disektor pariwisata hanya ada 1, disektor perindustrian dan disektor tenaga kerja tidak sama sekali perizinan yang diterbitkan selama tahun 2020. Sedangkan Non Izin yang paling banyak dikeluarkan izin atau diterbitkan izinnnya yaitu sektor sosial sebanyak 18 selama 2020, selanjutnya di sektor kelautan dan perikanan juga sektor perdagangan hanya 1 kali diterbitkan izin selama tahun 2020, disektor lain seperti sektor, tenaga kerja, kesehatan, pariwisata, pertanian dan perkebunan tidak ada.

Pada tahun 2019 jika dilihat dari perusahaan dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Penanama Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan izin/ non izin yang dikeluarkan didapat data sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel. 2 Jumlah Perusahaan PMA/PMDN Izin/ Non Izin Yang Tercatat

| No. | Jenis Perizinan | 2019 |
|---------------|------------------------------------|-------------|
| 1 | Izin Prinsip | 0 |
| 2 | Koperasi UMKM | 3 |
| 3 | Kelautan dan perikanan | 640 |
| 4 | Lingkungan Hidup | 37 |
| 5 | Kehutanan | 11 |
| 6 | Energi dan SDM | 584 |
| 7 | Kesehatan | 14 |
| 8 | Pertanahan | 0 |
| 9 | Pariwisata | 0 |
| 10 | Perdagangan | 1 |
| 11 | Perindustrian | 0 |
| 12 | Pekerjaan Umum & Perumahan | 20 |
| 13 | Pertanian dan perkebunan | 3 |
| 14 | Peternakan | 2212 |
| 15 | Perhubungan | 45 |
| 16 | Sosial | 28 |
| 17 | Tenaga kerja | 0 |
| 18 | Perencanaan dan Pembangunan Daerah | 0 |
| JUMLAH | | 3598 |

Sumber : Dinas Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Satu Pintu NTB, 2020

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa perusahaan PMA/ PMDN Izin/ Non Izin yang tercatat atau diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat ada 3598 selama tahun 2019. Dengan rincian paling banyak yang melakukan pengurusan dan tercatat dan diterbitkan di DPM-PTSP NTB, perusahaan sektor Peternakan 2212, perusahaan Kelautan dan Perikanan 640, perusahaan Energi dan SDM 584, perusahaan Perhubungan 45, perusahaan Lingkungan Hidup 37, perusahaan dibidang Sosial 28, Perusahaan dibidang Pekerjaan Umum dan Perumahan 20, Perusahaan dibidang Kesehatan 14, perusahaan yang bergerak dibidang Kehutanan 11, Perusahaan Pertanian dan Perkebunan 3, Perusahaan Koperasi dan UMKM 3, perusahaan Perdagangan 1, dan yang lain 0. Dari data di atas menunjukkan bahwa perizinan dan penanaman modal di Nusa Tenggara Barat mengalami naik turun jika dilihat berdasarkan kinerja dari triwulan pertama sampai triwulan empat. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“kalau kita telaah siklus orang yang berinvestasi di NTB, memang mengalami turun, hal tersebut akibat bencana gempa yang kita alami, karena investor atau oarg yang mau menanam modal di suatu daeran, pasti yang paling pertama dilihat adalah keamanan dan peluang usaha jangka panjang, tapi memang harus diakui di tahun 2020 itu izin yang dikeluarkan disektor Peternakan yang paling banyak, setelah itu disektor kelautan dan perikanan

mengingat daerah kita memang memiliki potensi yang baik dikedua sektor itu” (08 Desember, 2021).

Dalam pelaksanaan pelayanan publik, khususnya di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, harus memberikan kepastian hukum juga kepastian waktu dalam proses pengurusannya, sehingga setiap warga negara atau perusahaan yang ingin melakukan usaha dan berinvestasi di NTB mendapatkan kemudahan dan memiliki *trust* kepada pemerintah provinsi. Kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah merupakan modal untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya, dan juga sekaligus untuk mengukur kinerja dinas terkait sejauh mana pemerintah melalui DPM-PTSP mampu memberikan kemudahan kepada investor dan pelaku usaha sehingga mau menginvestasi uangnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. penggunaan pengukuran kinerja pada instansi publik merupakan untuk menentukan bagaimana kinerja organisasi bekerja (Sulle, 2014) selain itu bahwa pengukuran kinerja adalah bagian dari barometer manajemen kinerja, karena akan memberikan informasi kepada publik mengenai pekerjaan dari institusi publik (David, *at, el*, 2001).

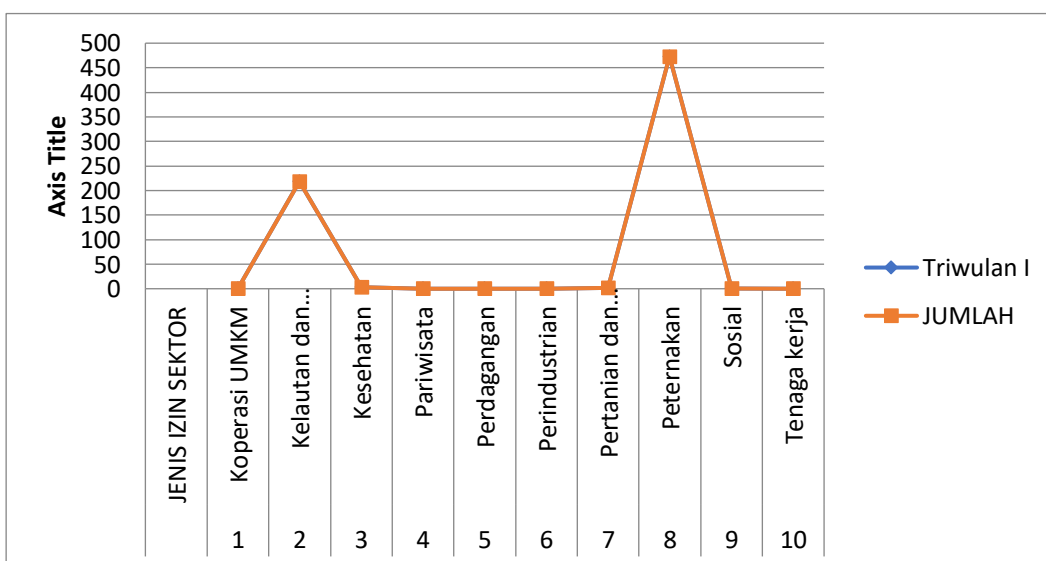
Keberhasilan dalam mewujudkan praktik pemerintah yang baik dan bersih dalam ranah pelayanan publik, akan mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat luas bahwa untuk membangun good governance bukan hanya sekedar mitos belaka tetapi bisa diwujudkan secara nyata, dengan demikian diperlukan kinerja yang baik dari institusi pemerintah untuk mewujudkan praktik good governance tersebut, dengan menerapkan sistem kinerja yang akuntabel, transparan, efektif, efisien, mudah dan berbiaya murah. Apalagi yang menyangkut dengan perizinan dan penanaman modal, yang menitikberatkan pada aspek kemudahan dan efektifitas yang tinggi supaya pemilik modal mau menanamkan modalnya di suatu daerah. Sebagaimana hasil wawancara dengan Seksi Potensi Penanaman Modal DPM-PTSP NTB.

“dalam memberikan kenyamanan dan keamanan para investor yang akan melakukan investasi di NTB, kami sudah punya prosedur dan SOP dalam pelaksanaan kemudahan pengurusan perizinan dan bagaimana alur untuk melakukan investasi di NTB, semua dilakukan secara online, hal tersebut untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat atau pelaku usaha, di kami selain pengurusan izin yang cepat, ada kepastian hukum jika terjadi sesuatu hal, itulah bentuk komitmen kami untuk mewujudkan investasi yang aman di NTB.” (10 Desember, 2021).

dari hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat, memberikan jaminan kemudahan yang diberikan kepada warga negara atau badan usaha yang akan melakukan investasi di NTB, sehingga payung hukum, prosedur, mekanisme dan seluruh perangkat yang berkaitan dengan perizinan dan penanaman modal dibuat lebih sederhana untuk memberikan kemudahan untuk para investor, supaya mau melakukan investasi di NTB, karena di NTB tidak bisa dipungkiri merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah, baik dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata, budaya dan lain

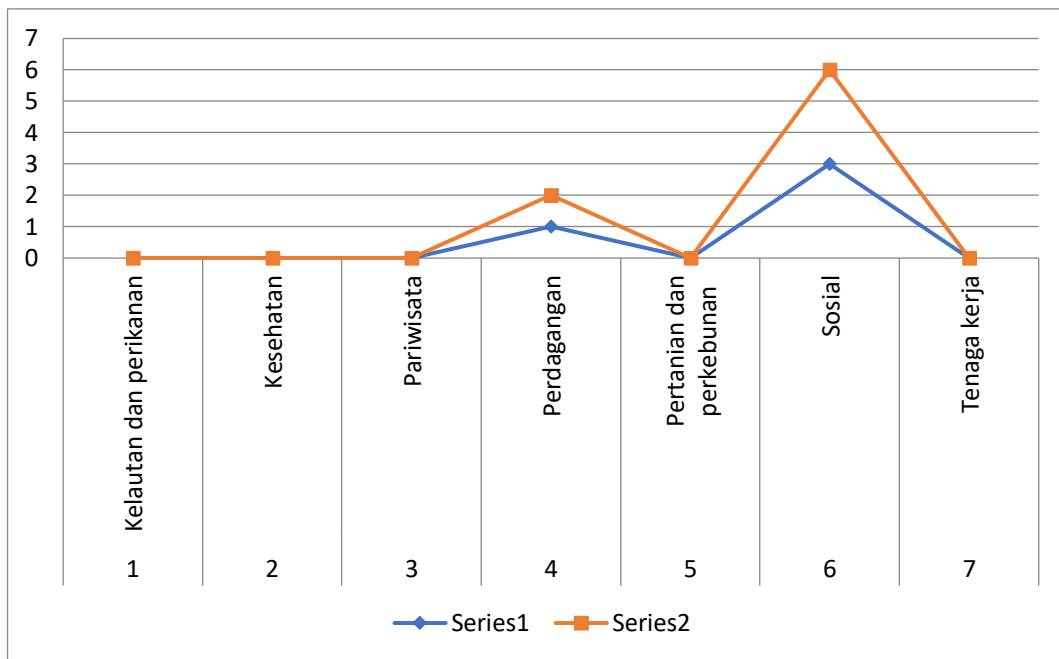
sebagainya. Walaupun NTB pernah diguncang Bencana Gempa Bumi yang dahsyat 2018 lalu, namun nilai investasi di NTB bisa dikatakan masih stabil, sebagaimana penuturan Kadis DPM-PTSP NTB Muhammad Rum, pada tahun 2020 investasi di NTB mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2019 nilai investasi hanya mencapai angka 10,3 Triliun, sedangkan pada tahun 2020 nilainya mencapai angka 11,6 Triliun. Capaian tersebut melampaui target dari yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk NTB. selain kerjasama dan kinerja seluruh komponen pegawai DPM-PTS yang bagus, menurut Muhammad Rum, capaian investasi yang melampaui target dikarenakan proses perizinan investasi di NTB yang sangat mudah dan bagus di mata investor. (Garda Asakota, 2021).

Sudah banyak daerah baik tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota yang terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanannya dengan mengembangkan unit pelayanan terpadu, termasuk di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan NTB, keharusan tersebut merupakan tuntutan zaman yang terus berkembang ditambah pesatnya laju perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, sehingga Pemerintah naik ditingkat pusat maupun di tingkat Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota harus terus berinovasi menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman, dan sudah pasti peningkatan kinerja diperlukan SDM unggul yang mampu berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang prima, terumata kemudahan dalam mendapat pelayanan sesuai kebutuhan dan kepentingan pengguna atau pelanggan. Jika hal tersebut mampu dimaksimalkan maka bukan pemerintah yang mencari investor untuk menginvestasikan modalnya di NTB, tapi para investorlah yang datang untuk menawarkan diri berinvestasi karena kemudahan yang ditawarkan, dan berikut realisasi Jumlah Izin dan Non Izin yang tercatat atau diterbitkan Sektor Ekonomi, Sosial, dan kemasyarakatan selama tahun 2021 di DPM-PTSP NTB sebagai berikut :



Gambar. 1. Diagram Jumlah Izin Yang Tercatat tahun 2021

Sumber : Dinas Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Satu Pintu NTB, 2021



Gambar 2. Diagram Jumlah Non Izin Yang Tercatat 2021

Sumber : Dinas Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Satu Pintu NTB, 2021

Berdasarkan data diagram di atas, menunjukkan jumlah izin yang tercatat atau diterbitkan disektor ekonomi, sosial dan kemasyarakatan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 698 dengan rincian, di sektor peternakan sebanyak 473, disektor kelautan dan perikanan 218, sektor kesehatan hanya ada 3, sektor pertanian dan perkebunan ada 2, sektor Koperasi dan UMKM ada 1, sektor sosial 1, sedangkan disektor pariwisata, perdagangan, perindustrian, dan tenaga kerja 0. Jika dilihat dari Non Izin yang tercatat atau diterbitkan selama tahun 2021 disektor sosial ada 3, sektor perdagangan ada 1, sedangkan sektor kelautan & perikanan, kesehatan, pariwisata, pertanian & perkebunan dan tenaga kerja 0. Dari data di atas juga menunjukkan selama tahun 2021 sektor peternakan, dan perikanan & kelautan yang banyak di urus perizinan investasinya yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Jika dilihat dari realisasi izin jumlah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Izin dan Non izin yang tercatat/ diterbitkan selama tahun 2020 didapat data sebagai berikut.

Tabel 3. Jumlah Izin dan Non Izin PMA dan PMDN Selama Tahun 2020

| No. | Jenis Izin dan Non Izin | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
|-----|-------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 1 | Izin Prinsip | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Koperasi UMKM | 2 | 0 | 5 | 4 |

| | | | | | |
|----|------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 3 | Kelautan dan perikanan | 163 | 157 | 160 | 157 |
| 4 | Lingkungan Hidup | 17 | 10 | 7 | 13 |
| 5 | Kehutanan | 5 | 5 | 1 | 3 |
| 6 | Energi dan SDM | 142 | 93 | 57 | 53 |
| 7 | Kesehatan | 10 | 4 | 10 | 5 |
| 8 | Pertanahan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pariwisata | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Perdagangan | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Perindustrian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pekerjaan Umum & Perumahan | 5 | 1 | 5 | 4 |
| 13 | Pertanian dan perkebunan | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Peternakan | 540 | 488 | 754 | 903 |
| 15 | Perhubungan | 20 | 9 | 14 | 16 |
| 16 | Sosial | 9 | 3 | 4 | 4 |
| 17 | Tenaga kerja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Perencanaan dan Pembangunan Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | JUMLAH | 915 | 771 | 1021 | 1162 |

Sumber : DPM-PTSP NTB, 2020

Tabel di atas menjelaskan bahwa realisasi izin dan non izin perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) yang tercatat atau diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2020 sebanyak 3869 izin. Dan yang paling banyak izin diterbitkan yaitu perusahaan dibidang peternakan sebanyak 2685, disusul oleh perusahaan dibidang kelautan dan perikanan sebanyak 637, perusahaan dibidang energi dan SDM sebanyak 345, perusahaan dibidang perhubungan 59, perusahaan dibidang lingkungan hidup 47, perusahaan dibidang kesehatan 29, perusahaan dibidang sosial 20, perusahaan dibidang pekerjaan umum dan perumahan 15, perusahaan dibidang kehutanan 14, perusahaan dibidang koperasi UMKM 11, perusahaan dibidang perdagangan 3, perusahaan dibidang pertanian dan perkebunan 3, perusahaan dibidanga pariwisata 1, sedangkan perusahaan dibidang pertanahan, perindustrian, tenaga kerja, dan perencanaan pembanguna daerah 0. Dengan demikian investasi dibidang

peternakan masih menjadi primadona di Provisni NTB. dan jika dilihat data tahun 2021 jumlah izin dan non izin Perusahaan Penanaman Modal asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) akan didapatkan data sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Jumlah Izin dan Non Izin PMA dan PMDN Selama Tahun 2021

| No. | Jenis Izin dan Non Izin | Triwulan I | Jumlah |
|---------------|----------------------------|------------|------------|
| 1 | Izin Prinzip | 0 | 0 |
| 2 | Koperasi UMKM | 1 | 1 |
| 3 | Kelautan dan perikanan | 218 | 218 |
| 4 | Lingkungan Hidup | 20 | 20 |
| 5 | Kehutanan | 2 | 2 |
| 6 | Energi dan SDM | 61 | 61 |
| 7 | Kesehatan | 3 | 3 |
| 8 | Pertanahan | 0 | 0 |
| 9 | Pariwisata | 0 | 0 |
| 10 | Perdagangan | 1 | 1 |
| 11 | Perindustrian | 0 | 0 |
| 12 | Pekerjaan Umum & Perumahan | 4 | 4 |
| 13 | Pertanian dan perkebunan | 2 | 2 |
| 14 | Peternakan | 473 | 473 |
| 15 | Perhubungan | 25 | 25 |
| 16 | Sosial | 4 | 4 |
| 17 | Tenaga kerja | 0 | 0 |
| JUMLAH | | 814 | 814 |

Sumber : DPM-PTSP NTB, 2020

Berdasarkan tabel di atas, menjelaskan tentang jumlah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri yang izin/ non izin diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu selama tahun 2021 sebanyak 814 izin. Dengan rincian paling banyak masih perusahaan yang bergerak dibidang peternakan sebanyak 473, perusahaan dibidang kelautan dan perikanan 218, perusahaan dibidang energi dan SDM 61, perusahaan dibidang perhubungan 25, perusahaan dibidang lingkunag hidup 20, perusahaan dibidang pekerjaan umum & perumahan 4, perusahaan dibidang sosial 4, perusahaan dibidang kesehatan 3, perusahaan dibidang kehutanan 2, perusahaan dibidang pertanian dan perkebunan 2, perusahaan dibidang koperasi UMKM 1, perusahaan dibidang perdagangan 1, perusahaan dibidang pertanahan, pariswisata, perindustrian, dan tenaga kerja 0.

Pelayanan publik dibidang penanaman modal atau investasi salah satu bidang yang sangat penting bagi suatu Negara juga daerah, karena selain dari pajak, investasi merupakan salah satu untuk menambah nilai APBN/APBD di negara-negara maju, investasi adalah bagian yang tak terpisahkan untuk melihat kemajuan

ekonomi, karena semakin banyak investor yang menginvestasikan uangnya di suatu daerah dan dikelola dengan baik, maka ekonomi suatu daerah tersebut sudah pasti maju dan akan menekan kemiskinan. Investasi bisa dari Penanaman Modal Asing (PMA) juga bisa dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau kelaborasi dari keduanya. Di NTB realisasi investasi diberbagai sektor termasuk bagus, walaupun capainnya tidak sebanyak daerah-daerah seperti di Jawa, namun mampu stabil. Berikut data realisasi investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Investasi dari Penanaman Modal Dalam negeri (PMDN) dari berbagai sektor yang tercatat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2021.

Tabel 5. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN dan PMA Di Provinsi NTB berdasarkan Sektor Tahun 2021

| No | Sektor | SEMESTER I | |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|
| | | PMDN (Rp.) | PMA (Rp.) |
| 1 | ESDM | 803.329.247.202 | 1.055.568.881.904 |
| 2 | Perhubungan/transportasi | 2.069.437.325.261 | - |
| 3 | Pariwisata dan ekonomi kreatif | 928.303.093.991 | 418.397.163.295 |
| 4 | Perdagangan | 413.147.402.528 | 2.736.023.844 |
| 5 | PUPR | 66.019.914.883 | 57.007.833.635 |
| 6 | Pos, telekomunikasi, sistem & transaksi elektronik | 3.373.604.246 | 46.786.502.994 |
| 7 | Kesehatan, obat dan makanan | 28.543.097.295 | 2.341.506.492 |
| 8 | Kelautan dan perikanan | 29.740.017.400 | 500.000.000 |
| 9 | Perindustrian | 50.808.935.954 | 974.000.000 |
| 10 | Ketenagakerjaan | 6.767.018.142 | - |
| 11 | Linkungan hidup | 895.000.000 | 1.208.523.999 |
| 12 | Pertanian, perkebunan dan peternakan | 10.493.437.071 | - |
| 13 | Pendidikan | 317.428.020 | - |
| Jumlah | | 4.411.175.521.993 | 1.585.520.436.163 |

Sumber : DPM-PTSP NTB, 2020

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2021 berdasarkan sektornya, dengan nilai investasi yang paling besar yakni pada sektor Penanaman Modal Dalam Negeri yaitu disektor Perhubungan dan Transportasi mencapai angka 2 Triliun lebih sedangkan nilai investasi dari PMA yang paling besar disektor ESDM mencapai angka 1 Triliun lebih sedangkan disektor pariwisata dan perdagangan mencapai 14 Miliar lebih baik dari investasi dari PMA dan PMDN. Semakin banyak investasi yang masuk di NTB akan mendorong percepatan ekonomi apalagi bencana wabah virus Covid-19 belum berakhir, sehingga dinas Penanaman Modal dan PTSP harus lebih

memahami strategis untuk meyakinkan para investor untuk mau menginvestasikan uangnya di NTB, begitupun dengan kinerja para pegawai secara kelembagaan harus ditingkatkan dan mampu membuat inovasi agar kemudahan perizinan invesasi semakin lebih sederhana dan biaya murah.

Pelayanan publik yang mendasarkan pada aturan hukum yang jelas, dan peningkatan kinerja akan membawa dampak yang baik pada layanan publik, pemerintah sebagai penyedia layanan harus mampu menunjukkan sikap yang benar-benar sebagai pelayan masyarakat, sehingga masyarakat yang akan melakukan investasi atau perusahaan yang akan menanamkan modalnya di Nusa Tenggara Barat, yakin dan tidak menutup kemungkinan akan memberikan informasi yang baik pada rekan-rekan kerja atau jaringan kerjanya untuk datang berinvestasi ke NTB, kemudahan, adanya kepastian hukum dan terjaminnya keamanan dalam berinvestasi menjadi tolak ukur yang utama yang perlu ada dalam dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu, sehingga *public trust* (kepercayaan publik) terhadap keamanan investasi di NTB benar-benar terjadi bukan sekedar hanya menjanjikan, karena jika kepercayaan publik tinggi otomatis semakin banyak warga negara dan perusahaan-perusahaan yang datang berinvestasi ke Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kepercayaan publik menjadi kunci dalam sebuah layanan publik, jika sudah tinggi *public trust*, tentu orang-orang akan berbondong-bondong untuk datang berinvestasi di NTB, persyaratannya sama, yaitu adanya kemudahan perizinan, transparan, semua informasi bisa diunduh melalui website, dan adanya jaminan terhadap keamanan investasi. Hal tersebut bisa digapai dengan adanya peningkatan kinerja seluruh elemen dari organisasi, peningkatan kinerja bisa dilakukan dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai, dukungan infrastruktur yang prima, aturan yang jelas, dan yang paling penting *political will* dari pejabat politik di daerah, sehingga jika dukungan dan komitmen dari pejabat politik dalam hal ini Gubernur kuat, tentu rantai birokrasi yang hirarkis dan ribet bisa diputus. Dan berikut data terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dinas Penanaman Modal dan PTSP NTB.

Dengan 9 (Sembilan) indikator dalam menilai kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Provinsi NTB dari hasil menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap DPM-PTSP sangat tinggi dengan angka 84,71%, dengan demikian kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP bagus dan mampu memberikan layanan yang baik terhadap para warga negara juga badan hukum aau perusahaan yang melaksanakan investasi di NTB.

KESIMPULAN

Pelayanan publik sangat berhubungan dengan bagaimana peningkatan kapasitas dan kemampuan pemerintah menjalankan fungsi pelayanan, baik dari pendekatan ekonomi, sosial, dan politik. Pada pelayanan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Nusa Tenggara Barat, mampu memberikan contoh pendekatan pelayanan sesuai kebutuhan pelanggan/ masyarakat sehingga prosedur, mekanisme perizinan dan non perizinan terkait investasi lebih mudah

dipahami, dan akses informasi terkait pengurusan perizinan invesatsi bisa diakses 24 jam setiap diwebsite resmi DPM-PTSP NTB, seluruh rangkaian pengurusan izin dan non izin invesatsi dibuatkan alurnya, dan tersedia di website, hal tersebut untuk memberikan kemudahan, juga sebagai bentuk komitmen dalam menyediakan pelayanan yang terpadu, mudah dan efisien dan hasil penelitian menunjukkan bahwa *publik tust* terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP cukup tinggi dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang meliputi persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya tarif, produk layanan, kompetensi layanan, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, penanganan pengaduan, sarana dan masukan.

REFERENSI

- Akhmaddhian, S. (2012). Pengaruh reformasi birokrasi terhadap perizinan penanaman modal di daerah (Studi kasus di Pemerintahan Kota Bekasi). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 464-478.
- Budiman, H., & Akhmaddhian, S. (2015). Implementasi Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Pananaman Modal di Kabupaten Kuningan. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).
- Enggarani, N. S. (2016). Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali. *Law and Justice*, 1(1), 16-29.
- Ginting, B. (2008). Kepastian Hukum dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi di Indonesia.
- Halik, A. (2014). Kajian Pengembangan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui Perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU). *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 6(1), 1-18.
- Hermawan, S. (2018). *Analisis Proses Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang* (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Sciences).
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2000). Using the balanced scorecard as a strategic management system.
- Putra, H. G. (2014). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Publik Terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (Studi Empiris Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Akuntansi*, 2(3).
- Rizal, K. (2018). *Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Kredit Investasi, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Di Provinsi Nusa Tenggara Barat* (Doctoral Dissertation, University Of Muhammadiyah Malang).
- Suparman, N. (2017). Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Borneo Administrator*, 13(1), 41-56
- Tambunan, T. (2007). Kendala Perizinan dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia dan Upaya perbaikan yang perlu dilakukan pemerintah. *Jurnal Hukum Bisnis*, 26(4).

Wahyuni, N. (2012). Analisis rasio untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah kota malang. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 1(1)

Garda Asakota, 2021. <https://www.gardaasakota.com/2021/01/realisasi-investasi-ntb-2020-rp116-t.html?m=1> (Dikutip Pada Hari Kamis, 09 Desember, 2021 Pkl 17.30 Wita).

Hasil Wawancara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat, 08 Desember, 2021

Hasil Wawancara Kepala Seksi Potensi Penanaman Modal DPM-PTSP NTB, 10 Desember, 2021.